

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SKEMA.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	31
1.3 Tujuan Penelitian.....	31
1.4 Manfaat Penelitian.....	32
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	32
1.4.2. Manfaat Praktis.....	33
1.5 Sistematika Penulisan.....	33
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	37
2.1 Landasan Teori.....	37
2.1.1. Teori Keadilan Restoratif.....	37
2.1.1.1. Kebijakan Hukum Pidana.....	62

2.1.1.2.	Perkembangan Teori Pemidanaan dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	67
2.1.1.2.1	Sanksi Pidana dan Tindakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	75
2.1.1.2.1.1	Sanksi Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	75
2.1.1.2.1.2	Sanksi Tindakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	86
2.1.1.3.	Wewenang Penuntutan Peradilan Pidana Anak di Indonesia.....	87
2.1.1.3.1.	Wewenang Penuntutan Menurut Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.....	87
2.1.1.3.2.	Wewenang Penuntutan Menurut Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.....	92
2.1.1.3.3.	Wewenang Penuntutan Menurut Undang-Undang R.I Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.....	93
2.1.1.3.4.	Wewenang Penuntutan Menurut Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Ana.....	97
2.1.2.	Teori Penegakan Hukum.....	101
2.1.2.1	Penerapan Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana.....	106
2.1.2.2	Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.....	110
2.1.2.2.1.	Definisi Anak dibawah Umur dan Perlindungannya.....	112
2.1.2.2.2.	Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak	119
2.1.2.2.3.	Asas-Asas Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	125
2.1.2.2.4.	Sanksi Pidana dan Tindakan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	128
2.1.2.2.4.1.	Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	129
2.1.2.2.4.2.	Sanksi Tindakan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	133
2.1.2.3.	Perundang-undangan Nasional terkait Peradilan Pidana Anak di Indonesia.....	135

2.1.2.3.1.	Peradilan Pidana Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	135
2.1.2.3.2.	Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang R.I Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.....	138
2.1.2.3.3.	Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.....	139
2.1.2.3.4.	Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.....	141
2.1.2.3.5.	Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang R.I Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.....	143
2.1.2.3.6.	Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang R.I Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....	146
2.1.2.3.7.	Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.....	149
2.1.2.3.8.	Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	150
2.1.2.3.9.	Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	154
2.1.3.	Teori Kemanfaatan Hukum dan Efisiensi.....	160
2.1.3.1.	Penyelesaian Perkara Tindak Pidana diluar Proses Peradilan di Indonesia.....	169
2.1.3.1.1.	Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	171
2.1.3.1.2.	Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	175
2.1.3.1.2.1.	Pengertian Diversi	175
2.1.3.1.2.2.	Sejarah Diversi.....	177
2.1.3.1.2.3.	Tujuan Diversi.....	180
2.1.3.1.2.4.	Jenis-Jenis Diversi.....	184

2.1.3.1.2.5. Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penuntutan.....	186
2.2. Landasan Konseptual.....	192
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.....	197
3.1. Jenis Penelitian.....	197
3.2. Pendekatan Penelitian.....	199
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	201
3.3.1. Lokasi Penelitian.....	202
3.3.2. Subjek Penelitian.....	203
3.4. Sumber Data Penelitian.....	207
3.5. Teknik Analisis Data.....	207
BAB IV: HASIL DAN ANALISIS.....	241
4.1. Bagaimana Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia?.....	241
4.1.1. Perundang-undangan Nasional terkait Peradilan Pidana Anak di Indonesia.....	241
4.1.1.1. Peradilan Pidana Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	241
4.1.1.2. Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang R.I Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.....	243
4.1.1.3. Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.....	245
4.1.1.4. Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.....	246
4.1.1.5. Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang R.I Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.....	249
4.1.1.6. Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang R.I Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....	251
4.1.1.7. Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang R.I Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.....	254
4.1.1.8. Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	255
4.1.1.9. Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	285

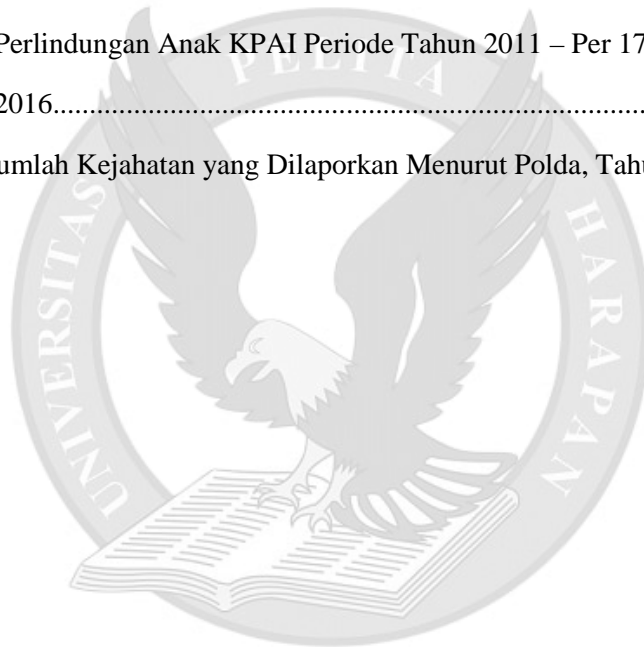
4.1.2.	Instrumen-instrumen Internasional terkait Peradilan Pidana Anak.....	291
4.1.2.1.	<i>The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners</i> (Peraturan Standar Minimum Perlakuan terhadap Tahanan) Resolusi 663 C 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 13 Mei 1977.....	291
4.1.2.2.	<i>The United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice</i> (Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Pelaksanaan Peradilan bagi Anak) atau <i>The Beijing Rules</i> Resolusi 40/33 29 November 1985.....	296
4.1.2.3.	<i>Convention on The Rights of The Child</i> (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) Resolusi 44/25 20 November 1989.....	300
4.1.2.4.	<i>The United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures "The Tokyo Rules"</i> (Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Tindakan Non-Penahanan) Resolusi 45/110 14 Desember 1990.....	305
4.1.2.5.	<i>The United Nations Guidelines for the Preventive of Juvenile Delinquency, "The Riyadh Guidelines"</i> (Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pencegahan Kenakalan Remaja) Resolusi 45/112 14 Desember 1990.....	308
4.1.2.6.	<i>The United Nations Rules for the Protection of Juvenile of Liberty</i> (Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Rangka Perlindungan Remaja yang Terampas Kebebasannya) Resolusi 45/113 14 Desember 1990.....	327
4.1.3.	Analisis Instrumen Internasional terkait Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	337
4.1.3.1.	Analisis <i>UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners</i> (Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Tahanan) Resolusi 663 C 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 13 Mei 1977 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	337
4.1.3.2.	Analisis <i>The United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice</i> (Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Pelaksanaan Peradilan bagi Anak) atau <i>The Beijing Rules</i> Resolusi 40/33 29 November 1985 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	340

4.1.3.3.	Analisis <i>Convention on The Rights of The Child</i> (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) Resolusi 44/25 20 November 1989 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	344
4.1.3.4.	Analisis The United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures "The Tokyo Rules" (Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Tindakan Non-Penahanan) Resolusi 45/110 14 Desember 1990 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	348
4.1.3.5.	Analisis The United Nations Guidelines for the Preventive of Delinquency "Riyadh Guidelines" (Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pencegahan Tindak Pidana Remaja) Resolusi 45/112 Desember 1990 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	350
4.1.3.6.	Analisis The United Nations Rules for the Protection of Juvenile of Liberty (Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Rangka Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya) Resolusi 45/113 14 Desember 1990 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	352
4.2.	Bagaimana Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Apabila Dibandingkan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak Negara lain?.....	353
4.2.1.	Sistem Peradilan Pidana Anak Malaysia.....	353
4.2.2.	Sistem Peradilan Pidana Anak Tiongkok.....	366
4.2.2.1.	Perbandingan Prosedur Peradilan Pidana Anak di Tiongkok dengan Indonesia.....	370
4.2.3.	Sistem Peradilan Pidana Anak Kanada.....	385
4.2.3.1.	Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Anak Kanada dengan Indonesia.....	390
4.2.4.	Sistem Peradilan Pidana Anak Jepang.....	393
4.2.4.1.	Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Anak Jepang dengan Indonesia.....	405
4.2.5.	Sistem Peradilan Pidana Anak Singapura.....	407
4.2.5.1.	Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Anak Singapura dengan Indonesia.....	413
4.2.6.	Sistem Peradilan Pidana Anak Inggris.....	415

4.2.6.1.	Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Anak Inggris dengan Indonesia.....	419
4.2.7.	Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia dan Negara Asing: Sebuah Catatan.....	420
4.3.	Bagaimana Pendekatan Efisiensi Terhadap Diversi pada Tahap Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia?.....	426
4.3.1.	<i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA) terhadap Penerapan Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.....	426
4.3.1.1.	Identifikasi Masalah.....	434
4.3.1.2.	Tujuan Kebijakan Yang Akan Dicapai.....	468
4.3.1.3.	Alternatif Penyelesaian Masalah.....	470
4.3.1.4	Identifikasi Dampak Ekonomi, Administrasi Publik, Lingkungan, Sosial.....	472
4.3.1.4.1.	<i>Status Quo</i> Sebagai Opsi (Ops 1A dan 2A).....	479
4.3.1.4.2.	Ops 1A.....	498
4.3.1.4.3.	Ops 2A.....	525
4.3.1.5.	Kuantifikasi atas Ops 1A.....	538
4.3.1.6.	Analisa Biaya dan Manfaat (Cost Benefit Analysis).....	550
4.3.1.7.	Konsultasi Publik.....	551
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....		554
5.1.	Kesimpulan.....	554
5.2.	Saran.....	560
DAFTAR PUSTAKA.....		xviii
RIWAYAT HIDUP PENULIS		xxviii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. <i>Economic Analysis of Law and Its Ultimate Goal</i>	217
Gambar 3.2. Proses Penyusunan <i>Cost Benefit Analysis</i>	223
Gambar 3.3. <i>Regulatory Impact Analysis dalam Economic Analysis of Law</i>	230
Gambar 4.1. <i>Impact Assessment Aspects</i>	427
Gambar 4.2. Siklus pembuatan RIA.....	428
Gambar 4.3. RIA: <i>The Rationale And The Assumption</i>	430
Gambar 4.4. Rincian Tabel Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perindungan Anak KPAI Periode Tahun 2011 – Per 17 Juli 2016.....	454
Gambar 4.5. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Polda, Tahun 2013.....	455



DAFTAR SKEMA

Skema 1.1. Skema Diversi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	27
Skema 3.1 <i>The Felicific Calculus</i>	213



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Analisa Dampak Opsi 1A.....	473
Tabel 4.2. Analisa Dampak Opsi 1B.....	474
Tabel 4.3. Analisa Dampak Opsi 1C.....	475
Tabel 4.4. Analisa Dampak Opsi 2A.....	476
Tabel 4.5. Analisa Dampak Opsi 2B.....	477
Tabel 4.6. Analisa Dampak Opsi 2C.....	478
Tabel 4.7. RIA Kuantitatif atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	539
Tabel 4.8. Rincian Perhitungan Biaya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	542
Tabel 4.9. Rincian Perhitungan Dampak Ekonomi Apabila Kondisi <i>Status Quo</i> Tidak Dilakukan Perubahan.....	544
Tabel 4.10. Rincian Dampak Administrasi Publik Apabila Kondisi <i>Status Quo</i> Dipertahankan.....	545
Tabel 4.11. Rincian Dampak Sosial Apabila Kondisi <i>Status Quo</i> Dipertahankan.....	546
Tabel 4.12. Rincian Dampak Lingkungan Apabila Kondisi <i>Status Quo</i> Dipertahankan.....	546
Tabel 4.13. Tabel Kuantifikasi Dampak Ekonomi Penerapan Opsi 1B.....	547
Tabel 4.14. Tabel Kuantifikasi Dampak Administrasi Publik Penerapan Opsi 1B.....	547
Tabel 4.15. Tabel Kuantifikasi Dampak Lingkungan Penerapan Opsi 1B.....	547
Tabel 4.16. Tabel Kuantifikasi Dampak Sosial Penerapan Opsi 1B.....	548
Tabel 4.17. Tabel Kuantifikasi Dampak Penerapan Opsi 1C.....	548
Tabel 4.18. Tabel Kuantifikasi Dampak Penerapan Opsi 2B.....	549
Tabel 4.19. Tabel Kuantifikasi Dampak Penerapan Opsi 2C.....	549